

The Overturning of Roe v. Wade as a Form of Post-Colonialism

Penggulingan Utusan Roe v. Wade Sebagai Bentuk Post-Kolonialisme

Aysha Hasna Z

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya

Jl. Veteran Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Malang, Indonesia. e-mail: ayshasna@gmail.com

Abstract

Roe V. Wade as an important ruling and guarantor of the life of United States women who want to have an abortion, has been officially canceled in 2022. The abolition of abortion rights, which has been around for nearly 50 years, was decided by the United States Supreme Court or SCOPUS, whose members are dominated by men, even though the people discriminated against here are 51% of the United States' population, which is their female population. The inability of U.S. women, particularly minority women and those in lower-middle-class economies, to fully hold autonomy over their respective bodies without prosecution is a form of neo-colonialism that can be explained from the research methods used is the review of the Literature, especially from the perspective of Gayatri C. Spivak in literature sources, namely her book Can the Subaltern Speaks, The subalterns in this discussion are a community of mothers who need medical attention related to pregnancy and their reproductive rights. Prohibited abortions here also count life-saving procedures for some women, rulings by a group of people considered highly exclusive and discriminatory against those who need legal protection for their actions. It should be that medical accessibility can include abortion surgery and can be guaranteed by the state as a fair and thorough application of power. The silence of women's voices in deciding this policy is a form of discrimination, not only based on gender but also race.

Keywords: Abortion, subaltern community, rights to live, United States, women

Abstrak

Roe V. Wade sebagai putusan penting dan penjamin hidup wanita Amerika Serikat yang ingin melakukan aborsi, telah secara resmi dibatalkan pada tahun 2022. Penghapusan hak aborsi yang telah berdiri hampir 50 tahun ini diputuskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat atau SCOPUS yang anggotanya didominasi oleh pria, padahal kaum yang didiskriminasi disini adalah 51% dari populasi Amerika Serikat, yaitu penduduk perempuan mereka. Ketidakmampuan perempuan AS, secara khusus perempuan minoritas dan yang berada di ekonomi menengah kebawah, untuk secara penuh memegang otonomi atas tubuh mereka masing-masing tanpa penuntutan merupakan salah satu bentuk neo-kolonialisme yang dapat dijelaskan dari metode penelitian yang digunakan ialah kajian Pustaka, terutama dari kaca mata Gayatri C. Spivak dalam sumber literatur, yaitu bukunya Can the Subaltern Speaks, kaum subaltern dalam pembahasan kali ini ialah komunitas para ibu yang membutuhkan perhatian medis terkait dengan kehamilan dan hak reproduktif mereka. Aborsi yang dilarang disini juga menghitung prosedur penyelamat hidup bagi sejumlah perempuan, putusan oleh sekelompok orang dianggap sangat eksklusif dan diskriminasi terhadap mereka yang butuh perlindungan hukum atas tindakannya. Seharusnya aksesibilitas medis dapat termasuk operasi aborsi, dan dapat dijamin oleh negara sebagai bentuk pengaplikasian kekuasaan yang adil dan menyeluruh. Bisunya suara wanita dalam memutuskan kebijakan ini adalah bentuk diskriminasi, tak hanya berdasarkan gender namun juga ras.

Kata kunci: Aborsi, Amerika Serikat, hak hidup, kaum subaltern, wanita

1. PENDAHULUAN

Wanita AS, yang dalam pembahasan ini dilihat sebagai seorang pasien yang membutuhkan perhatian medis, suaranya tidak didengarkan dan kekuatan politik mereka lemah dihadapan pemerintahan Amerika Serikat. Minimnya jumlah wanita yang tergabung dalam pembuatan keputusan juga menjadi faktor penting eksklusivitas proses policy making di negara ini. Secara historis, peran wanita dalam politik Amerika Serikat tidaklah signifikan, dilihat dari awal berdirinya SCOTUS pada tahun 1790, hanya pada tahun 1981 barulah wanita dapat menduduki jabatan, yaitu Justice Sandra Day O'Connor.

Perkembangan partisipasi wanita dalam pemutusan kebijakan selanjutnya iyalah peristiwa suffrage, yaitu diberikannya hak pilih kepada wanita di Amerika Serikat di abad ke-19 merupakan titik awal emansipasi dalam berpolitik, namun perkembangannya penuh dengan pro dan kontra, di satu sisi melihat bahwa pemberian kesempatan berpartisipasi politik kepada wanita merupakan hal yang kedepannya akan berbahaya karena akan jauh dari apa yang wanita kenal dekat, yaitu urusan rumah tangga. Namun perkembangan terus terjadi hingga terciptalah kepastian hukum bagi wanita, salah satunya, peristiwa penuntunan oleh Jane Roe dari Texas yang kemudian berakhir dengan terciptanya putusan Roe V. Wade.

Diawali dari Dallas, Texas, di tahun 1960-an, yang awalnya hanya mengizinkan operasi aborsi dengan syarat kehamilan membahayakan hidup sang ibu. Wanita-wanita seperti Norma McCorvey (dengan nama samaran Jane Roe) yang terancam penjara karena ingin menjalankan aborsi, dan kuasa hukumnya, Linda Coffee dan Sarah Weddington, melawan prosekutor Henry Wade sebagai pendukung larangan aborsi, berhasil merombak kebijakan dengan meninjau kembali amandemen keempatbelas Amerika Serikat yang berisi,

“The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.”

Putusan Roe V. Wade menjadi dasar hukum yang telah 40 tahun menjamin hak dari perempuan Amerika Serikat yang menjalankan prosedur aborsi. Landmark judgement ini membebaskan wanita dan menguatkan hak mereka untuk memberlakukan autonomi atas tubuh mereka sendiri, telah secara legal dibatalkan oleh Supreme Court of the United States (SCOTUS) atau Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pembatalan ini merupakan putusan sepihak yang menimbulkan pro dan kontra dari rakyat Amerika Serikat, dua kubu politik di negara ini pun, sayap kanan dan kiri, terbawa masalah pembatalan putusan Roe V. Wade. Permasalahan ini diangkat ke jejaring sosial yang kemudian populer tidak hanya menjadi pembahasan di ranah dalam negeri saja, namun banyak warga negara luar AS yang ikut menyuarakan pendapat mereka, mendukung ataupun menolak penggulingan putusan penting ini. Penggunaan kuasa Mahkamah Agung dalam hal ini tidak dapat mencerminkan keinginan rakyat mereka sendiri, bahkan setelah banyaknya protes dan unjuk rasa dari berbagai penjuru dunia, terlebih dari kaum pro-choice, keputusan ini tidak ditinjau kembali untuk memenuhi kepentingan rakyat.

Munculnya dua kubu, afirmasi dan oposisi, atas topik ini sering dikaitkan dengan kubu konservatif dan liberal, dimana kebanyakan liberal menolak pembatalan Roe V. Wade, sedangkan kubu konservatif mendukung pembatalan putusan. Argumen dari pihak konservatif merasa bahwa aborsi, secara moral, seimbang dengan pembunuhan dan bukan seharusnya dijadikan kepentingan publik, kebijakan mengenai aborsi tidak diperlukan karena pembicaraan mengenai seks merupakan hal yang tabu, namun bila dilihat dari sisi lain penolakan hak wanita untuk menjalankan aborsi akan memperpanjang durasi kehamilan yang bersifat "parasitic" bagi sang ibu.

Disini, walaupun merupakan sebagian dari populasi, pemberian hak bagi wanita dari kaum yang berkuasa masih terkesan pelit. Tidak didengarkannya opini wanita mengenai hak hidupnya dapat diasumsikan sebagai kaum subaltern yang tidak bisa berdiri dan menyuarakan pendapatnya sendiri, stigma bahwa wanita butuh perwakilan yang lebih legitimate memundurkan usaha tokoh-tokoh feminis terdahulu untuk menjamin hak dan kedaulatan wanita dalam menentukan sendiri nasibnya.

Gerakan feminisme dalam menegakkan kebebasan wanita didorong mundur karena putusan ini, Amerika Serikat sebagai pelopor gerakan kewanitaan telah mengecewakan pendukungnya secara global. Kembalinya lagi stigma buruk bagi operasi aborsi dan wanita yang menjalankannya.

Maka dari itu, persepsi Gayatri C. Spivak yang dekat dengan masalah feminisme dianggap cocok untuk membahas bagaimana pembatalan utusan Roe V. Wade dapat menjadi bentuk Neo-Kolonialisme bagi wanita, tidak hanya di Amerika Serikat, namun dapat mengefek ke seluruh dunia, di abad ke-21. Spivak menjelaskan tentang kondisi seperti apa yang menjadikan suara wanita untuk tidak digubris oleh mereka yang duduk di jajaran hasil imperialisme dan globalisasi yang sekiranya sangat patriarkial, seperti negara.

Keamanan kesehatan reproduksi wanita AS serta dunia terancam karena putusan sepihak dari mereka “representative”, namun dalam pengartian ini masuk kedalam vertreten yang lebih menjelaskan substitusi dan sebagai otoritas dari pihak yang dianggap tidak eligible. Dilihat dari keanggotaan SCOTUS, terdiri dari 1 Chief Justice dan 8 Associate Justices sehingga total 9 anggota, yang 6 diantaranya merupakan konservatif, bukan hal yang mengejutkan bila badan tinggi AS memutuskan hal yang kontroversial ini di abad yang terbilang “progressive”.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelumnya, mari kita bahas sejarah aborsi bagi wanita di Amerika sebelum disahkannya putusan Roe V. Wade, hubungan seksual antara pria dan wanita di luar pernikahan mendapatkan stigma yang buruk, namun hal ini tidak ditemani dengan pendidikan mengenai seksualitas dan kontrasepsi yang memadai, sehingga wanita muda yang menjadi ibu dipaksa untuk mempertahankan kehamilannya untuk nantinya diberikan kepada keluarga yang ingin mengadopsi.

Revolusi seksual tahun 1960-an diawali dengan “generasi bisu” yang dijalankan pada 1940-1950an, ditemani dengan meningkatnya angka orang tua tunggal, hal ini dapat dijelaskan karena salah satunya adalah setelah sekian lama menjalani hidup penuh penderitaan (The Great Depression dan Perang Dunia II), rakyat Amerika Serikat menginginkan untuk lebih “menikmati hidup”, namun tidak dibarengi dengan edukasi seks yang memadai, bahkan usaha untuk mengimplementasikan pendidikan seks dikecam oleh kelompok konservatif seperti the Christian Crusade.

Dianggap malah memotivasi golongan muda untuk melakukan hubungan seks diluar pernikahan, kontraseptif yang dibiayai oleh pemerintah hanyalah abstinence, atau penahan nafsu pada tahun 1981. Seorang dokter bedah, Joycelyn Elders dipecat karena menyampaikan pendapat dalam forum mengenai AIDS, bahwa seksualitas manusia seharusnya menjadi edukasi dan bukan untuk diabaikan. Meskipun begitu, dilihat dari persentase sebesar 82% wanita di US, yang lahir kisaran tahun 1939-1948, sebelum mencapai umur 30 telah terlibat dalam seks diluar nikah.

Konflik yang terjadi dalam mengimplentasi pendidikan seksual terlihat dari perbedaan pandangan moral mengenai aborsi dan orientasi seksual. Konflik ini semakin sengit karena pada tahun 1960-an arena politik didominasi oleh kubu kanan.

Tentu hal ini tidak terlepas dari angka wanita hamil yang sangat rentan bertemu dengan kecaman dan bahaya pada era post-Perang Dunia II, tahun 1945-1965 merupakan waktu yang sangat buruk bagi wanita-wanita yang hamil diluar nikah karena status suram yang diberikan kepada mereka.

Usaha awal dalam meregulasi nasib ibu hamil dimulai dari pidato Margaret Sanger di Teater Hartford's Parsons yang mengkritisi Undang-Undang Connecticut dengan menuntut agar setiap Pusat Kesehatan seharusnya menyediakan kontrasepsi, seperti pill KB, dan pendidikan dalam penggunaannya untuk “membebaskan wanita dari beban kandungan yang sebenarnya tidak diinginkan”. Sanger mempertegas bahwa ia tidak mendukung Gerakan aborsi, namun untuk mencegah awal dari suatu kehidupan. Ia juga menjelaskan bahwa informasi mengenai kontrasepsi hanya diberikan kepada wanita yang telah menikah karena mereka yang seharusnya memegang tanggung jawab atas hal tersebut, bukan wanita lajang. Pada akhirnya, tuntutan American Birth Control League di berbagai wilayah gagal diterima oleh legislatif.

Setelah mendapat banyak dukungan dari masyarakat, terutama dokter, serta pembubaran pergerakan Birth Control di New York pada 1921, dan penangkapan tenaga kesehatan dari Birth Control Clinical Research Bureau, terjadi peningkatan atensi masyarakat mengenai topik ini. Rancangan UU telah diajukan dan klinik-klinik telah dibangun.

Pada tahun 1935, seorang professor medis dari Yale, Wilder Tileston menemukan tiga kasus berbeda yang melanda 3 ibu hamil, dengan nama samaran Jane Roe, Mary Doe, dan Sarah Hoe, yang mana nyawa dari ketiganya terancam karena kehamilan mereka. Tentu hal ini membawa perspektif baru dalam

menjalankan Konstitusi Connecticut, Konstitusi Amerika Serikat (spesifiknya amandemen ke -14), dan hak istimewa Tileston sebagai dokter.

Pada tahun 1960-1970an pergerakan liberasi seksual dan feminisme menjamur, kedua gerakan ini menjadi salah dua faktor yang mengubah paradigma kedudukan wanita dan pria dalam dunia hukum. Feminis mengangkat kembali permasalahan mengenai hak wanita dalam mendapatkan aborsi yang aman dan legal, hal ini menciptakan hubungan baru antara wanita dan tenaga kesehatan.

Awal kasus Roe V. Wade diawali dari seorang wanita bernama Norma McCorvey yang menuntut Henry Wade, seorang pengacara, bersama dengan kuasa hukumnya Linda Coffee dan Sarah Weddington di Texas. Tuntutan ini dibawa ke pengadilan dengan SCOTUS mengesahkan keputusan untuk melegalkan aborsi dibawah konstitusi ke-14 pada 22 January 1973.

Terdapat putusan lain yang sama penting disahkan, yaitu putusan Doe v. Bolton, dari tuntutan Sandra Bensing (nama samara Mary Doe) kepada jaksa agung negara bagian pada saat itu, Arthur K. Bolton. Tuntutan ini berhasil menghilangkan pembatasan akses aborsi yang awalnya hanya untuk wanita Georgia saja, yang mana diberi rasionalisasi bahwa suatu negara bagian tidak seharusnya mengekang akses layanan kesehatan bagi rakyatnya. Berbeda dengan temannya, putusan ini tidak dicabut oleh SCOTUS pada tahun 2022 ini.

Putusan Roe v. Wade

Walau telah secara resmi ditetapkan di seluruh negara bagian, masih banyak pihak yang menggugat putusan ini dikarenakan Wade saat itu ingin menuntut kasus kriminal terhadap Dr. Hallford, dan melegalkan aborsi dianggap melanggar Amandemen 9 yang menjelaskan tentang hak wanita untuk mengandung. Bahkan putusan ini awalnya tidak dapat memberikan kepastian bahwa seluruh wanita yang membutuhkan aborsi akan mendapatkan akses.

Namun di tahun 1976, pembiayaan senjata dialihfungsikan untuk membiayai sebagian besar operasi aborsi di Amerika Serikat karena dikeluarkannya The Hyde Amendment setelah 3 tahun ditetapkannya utusan Roe V. Wade dan Doe V. Bolton oleh Henry Hyde untuk Undang-Undang Alokasi Pendidikan dan Kesejahteraan tahun 1977 yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan.

Sebagai tahun yang penting dalam sejarah feminisme, pada dekade 1970 terdapat perubahan dalam The Hyde Amendment untuk hanya membiayai operasi aborsi bila kehamilan dikarenakan pemerkosaan, incest, maupun yang membahayakan nyawa sang ibu.

Perkembangan utusan Roe V. Wade dan Amandemen Hyde selanjutnya mengikuti perubahan kabinet Amerika Serikat, pada masa kepemimpinan Bill Clinton, persetujuan mengenai ketahanan putusan ini mereda karena beliau merupakan presiden yang berada di kubu “Pro-choice”.

Penolakan utusan ini tak hanya diekspresikan dalam meja konstitusi, namun kekerasan dan pembunuhan mulai marak terjadi kepada pihak Pro-aborsi yang berasal dari Program Scheidler dan Terry pada tahun 1993, walaupun kedua pihak telah berusaha mengurangi efek program ini, namun pihak oposisi masih tetap melanjutkan terror, dilihat dari kasus pembunuhan Dr. David Gunn di Rapat Umum Anti-Aborsi pada 10 Maret 1993.

Menurut penelitian di tahun 1999, terdapat penurunan tingkat kesuburan di beberapa negara bagian, terlebih penurunan kehamilan diluar nikah dan angka kehamilan minoritas, setelah penetapan Roe V. Wade. Namun yang kita tau ialah bila mengkriminalisasi aborsi maka angka kematian ibu juga akan meningkat.

Putusan ini dilihat sebagai akhir dari Revolusi Seksual yang telah dibangun di tahun-tahun sebelumnya, dan memberikan pandangan yang baru mengenai wanita dan kehamilan, bahwa “kehamilan merupakan pilihan untuk para ibu dan bukan merupakan prasyarat untuk menjadi ibu”.

Roe V. Wade telah berdiri sekiranya 50 tahun, menjamin kehidupan para ibu, khususnya para ibu dari kaum minoritas. Tidak bisa dipungkiri bahwa putusan ini berpengaruh bagi keselamatan hidup para ibu yang menjalani aborsi, dilihat dari sedikitnya angka kematian bagi wanita yang menjalankan aborsi legal daripada wanita yang menjalankan kuretase dengan operasi lain.

Memang betul adanya putusan Roe V. Wade membantu para ibu dalam melakukan aborsi yang tentu tidak sejalan dengan pandangan konservatif, namun pada masa pemerintahan Presiden Reagan yang merupakan seorang konservatif, terdapat pemotongan pembiayaan untuk program sosial, salah satunya pembiayaan untuk perawatan sebelum kelahiran bagi wanita dan Medicaid (sejenis BPJS di Amerika

Serikat). Konservatif yang awalnya sangat menghargai kehidupan kandungan dan sang ibu sekarang terlihat menjadi hipokrit karena pemotongan dana ini. Pihak yang paling dirugikan dari program yang menjadi argument terpenting dalam perdebatan Pro-Life Vs. Pro-Choice ialah wanita dari etnik minoritas dan wanita dengan tingkat ekonomi rendah.

Meningkatnya tingkat aborsi legal di Amerika Serikat setelah putusan ini dapat dilihat sebagai mudahnya akses kesehatan reproduksi bagi wanita Amerika Serikat, berbanding terbalik dengan sebelum pemutusan yang mana angka operasi ilegal dapat mencapai 1,2 juta pertahunnya, serta kematian wanita akibat prosedur aborsi ilegal atau “back door procedure” dapat mencapai angka 10.000 per tahunnya.

Sayangnya pada 24 Juni 2022 setelah putusan *Dobbs V. Jackson Women’s Health Organization* sepakat diimplementasikan, putusan yang telah melindungi hak wanita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan akhirnya dicabut.

Padahal dari tahun ke tahun angka aborsi ilegal terus naik, data dari The CDC menunjukkan angka aborsi yang naik dari 13,5 menjadi 14,4 per 1.000 wanita tahun 2019 dan 2020. Pencabutan putusan ini dianggap “tone deaf” karena “trend” aborsi yang semakin meningkat tidak diikuti dengan pemberian pelayanan legal yang mencukupi, hal ini tentu akan menghasilkan kembalinya lagi bisnis aborsi ilegal yang notabene lebih berbahaya untuk wanita dan janin mereka.

Efek *Roe V. Wade* pun tak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat, namun telah memengaruhi, bahkan menjadi basis keputusan kebijakan mengenai kesehatan di berbagai negara. Dicabutnya putusan ini maka secara langsung akan mengubah standar kesehatan reproduktif dan pandangan mengenai akses aborsi secara global.

Wanita Sebagai Kaum Subaltern

Pemimpin negara yang kebanyakan merupakan pria melihat bahwa aborsi dapat mengancam kuantitas dari pekerja dan tentara masa depan, bahkan pandangan yang lebih radikal lagi ialah akan mengurangi angka ras “terpilih”.

Penggulingan ini tidak hanya menjadi bentuk diskriminasi secara gender, namun juga bentuk rasisme. Tubuh wanita, terlebih tubuh wanita minoritas dilihat sebagai “properti” bagi pria berkulit putih.

Gayatri C. Spivak dalam karyanya “Can the Subaltern Speak?” menjelaskan tentang perbedaan representatif *Vertretung* dan *Darstellung* yang mana aksi “mewakili” dari kaum elit dan kaum subaltern, kaum yang suaranya tidak dapat didengar dalam hal ini dispesifikasi menjadi kaum wanita pribumi di masa kolonial yang pendapatnya tidak berarti di telinga lelaki pribumi apalagi penjajah. Gayatri dalam karyanya *Can the Subaltern Speak* menjelaskan bahwa “tidak ada kaum subaltern yang diketahui memiliki kemampuan untuk merepresentasikan dan menyuarakan pendapat mereka sendiri”.

Efek dari sistem patriarki terlihat dari eksploitasi wanita di negara Third World yang tidak berdaya di mata pembagian kerja internasional. Mereka tidak bisa mempersatukan kekuatan karena adanya perbedaan kelas, tempat, agama, dan faktor lainnya.

Berusaha untuk mengaplikasikan *tabula rasa* dalam meneliti kaum subaltern, dalam kata-kata Gayatri adalah untuk “berbicara kepada” bukan “mendengarkan” ataupun “berbicara atas nama mereka”.

Walaupun wanita di Amerika Serikat yang merupakan negara maju, mungkin tidak dapat dihitung sebagai kaum subaltern namun dalam konteks penggulingan utusan ini, kepentingan mereka tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan kebijakan. Wanita minoritas dan mereka yang ekonominya rendahlah yang sebenarnya tidak dapat menyuarakan opini mereka sebagai warga negara yang berdaulat.

Keputusan *Dobbs V. Jackson* tidak akan dirasakan oleh mereka yang memutuskan, tetapi mereka yang tidak bisa merepresentasikan diri sendiri. Ditutupnya praktek aborsi memotivasi berbagai pihak yang membutuhkan berpergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Keputusan ini merupakan bentuk diskriminasi gender dan ras yang telah berakar dalam sistem di negara Amerika Serikat. Hakim Ginsburg sendiri menjelaskan bahwa “kehidupan wanita Amerika Serikat tanpa putusan *Roe V. Wade* akan mengembalikan nasib mereka seperti 30 tahun yang lalu, tanpa kontrol atas jumlah dan keadaan kehamilan mereka yang akan menjadi faktor mereka kehilangan kesempatan dalam mengenyam pendidikan dan pekerjaan”.

Sedikitnya aktor yang memutuskan kebijakan atas kehidupan banyak orang mencerminkan representative secara *Vertretung* atau sebagai delegasi. Disini aktor pemutus kebijakan tidak dapat merasakan penderitaan subjek yang mereka representasikan, dalam hal ini karena mayoritas pemegang

kuasa adalah pria yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar, tidak dapat menggambarkan secara penuh keinginan rakyat wanita mereka, khususnya dari etnik minoritas dan ekonomi rendah, yang tidak mendapat hak istimewa yang sama.

Secara global, Amerika Serikat sebagai penopang gerakan feminisme merupakan bentuk putusan yang melanggar hak pokok dalam hidup seorang individu. Aborsi menjadi ilegal akan membawa dampak buruk bagi kepentingan kesehatan masyarakat lainnya yang isunya telah di dekriminialisasi.

Amerika Serikat menentang trend menuju liberalisasi dalam undang-undang aborsi, ini diprediksi tentu akan memperburuk masalah di bidang lain, seperti tingginya angka kematian ibu dan perbedaan ras.

Pencabutan peraturan mengenai aborsi akan mengganggu visi sistem kesehatan yang merata, tak hanya di Amerika Serikat, namun untuk seluruh dunia karena globalisasi dan eratnya hubungan antar negara dan gerakan dari Aktivis Keadilan Reproduksi yang menuntut HAM mengenai hal ini untuk diatur dalam kerangka hukum dan perjanjian global yang melampaui kekuatan konstitusi Amerika Serikat.

3. KESIMPULAN

Putusan untuk mencabut Roe V. Wade yang hampir 50 tahun melindungi hak wanita dalam mengurus tubuhnya sendiri telah disahkan pada 24 Juni 2022. Keputusan ini merupakan keputusan sepihak dari SCOTUS yang mendiskriminasi lebih dari setengah populasinya, yaitu wanita, terlebih wanita minoritas dan golongan menengah-kebawah.

Meneliti fenomena ini dari kacamata Gayatri C. Spivak memberikan pandangan baru akan bagaimana suatu keputusan oleh representasi rakyat dapat secara gamblang menghilangkan hak dan suara subjek yang mereka representasikan. Suara rakyat mereka sendiri tidak terdengar dan penting dalam pemutusan kebijakan yang nantinya dijalankan oleh rakyatnya.

Efek dari pencabutan putusan ini tak hanya berefek di lingkungan Amerika Serikat saja, namun karena Amerika Serikat merupakan kiblat liberalisasi serta banyaknya gerakan global maka akan memengaruhi pandangan dan keputusan negara lain terhadap pelegalan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, P. (2009). *The Domestication of Politics: Women and American Political Society, 1780-1920*. *The American Historical Review*, 620-647.
- Diamant, J. (2022, June 24). What the data says about abortion in the U.S. Retrieved from Pew Research Center: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/06/24/what-the-data-says-about-abortion-in-the-u-s-2/>
- Fesler, A. (2007). *The Girls Who Went Away*. London: Penguin Books.
- Ford, L. E. (2010). *Encyclopedia of Women and American Politics*. New York: Infobase Publishing.
- Garrow, D. J. (1998). *Liberty and Sexuality*. New York: Open Road Integrated Media Inc.
- Hull, N. E. (2010). *Roe V. Wade: The Abortion Rights Controversy in American History*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Jones, R. K. (2013). At What Cost? Payment for Abortion Care by U.S. Women. *Women's Health Issues*, 173-178.
- Levine, P. B. (1999). Roe V. Wade and American Fertility. *American Journal of Public Health*, 199-203.
- McGovern, T. (2022). Overturning Roe v Wade has had an immediate chilling effect on reproductive healthcare. *BMJ*, 377.
- Northup, N. (2018, Maret 3). *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization: U.S. SUPREME COURT TAKES AWAY THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO ABORTION*. Retrieved from Center for Reproductive Rights : <https://reproductiverights.org/case/scotus-mississippi-abortion-ban/>
- Sanchez, K.-C. (2022). Repercussions of overturning Roe v. Wade for women across systems and beyond borders. *Reproductive Health*, 184.
- Spivak, G. C. (1988). Can the Subaltern Speak? Cary Nelson and Lawrence Grossberg's Marxist and the Interpretation of culture, 66-111.